

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan dengan Pendekatan *Human Centered Design*

Devi Citasari¹, A'an Warul Ulum²

Universitas Yudharta Pasuruan

sdevicitasari@gmail.com¹, aan@yudharta.ac.id²

ABSTRACT

Development planning is a strategic process involving various stakeholders in formulating steps to improve community welfare. One crucial element in this process is community participation, which not only reflects democratic rights but also plays a vital role in the success of development programs. This study highlights the low level of community participation in the Development Planning Forum (Musrenbang) in Pasuruan Regency, East Java. The low participation is influenced by several factors, including low educational attainment, work priorities, and a lack of understanding of the importance of involvement in development. Using the Human Centered Design (HCD) approach, this study proposes the application of five HCD stages—Empathize, Define, Ideate, Prototype, and Test—as a model to enhance and sustain community participation in the local development planning process.

Keywords: *development planning, community participation, musrenbang, Human Centered Design*

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan merupakan proses strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun langkah-langkah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah partisipasi masyarakat, yang tidak hanya mencerminkan hak demokratis, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan program pembangunan. Penelitian ini menyoroti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan yang rendah, prioritas terhadap pekerjaan, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan. Dalam kerangka pendekatan *Human Centered Design* (HCD), studi ini mengusulkan penerapan lima tahap HCD – *Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test* – sebagai model untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kata kunci: *perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, musrenbang, Human Centered Design*

PENDAHULUAN

Proses merancang perubahan suatu wilayah menuju arah masa depan yang lebih baik disebut perencanaan pembangunan. Menurut definisi paling mendasarnya, perencanaan adalah proses pengorganisasian tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Tjokroamidjojo tahun 1948 (dalam Wirawan, et al 2015:304).

Perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai proses pengumpulan tahapan-tahapan suatu kegiatan dengan melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan untuk menggunakan dan mengalokasikan bahan-bahan guna meningkatkan kesejahteraan umum suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Tahapan dalam proses perencanaan pembangunan tidak lepas dari peran partisipasi masyarakat. Karena masyarakat dipandang sebagai topik dalam pembangunan, kebijakan dan inisiatif pembangunan saat ini secara langsung memengaruhi masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk terlibat baik dalam perumusan kebijakan maupun penerapan kebijakan itu sendiri, karena mereka yang paling memahami keadaan lingkungan mereka. Keterlibatan masyarakat adalah elemen krusial yang harus diperhatikan untuk menyatukan kehendak pemerintah dan harapan rakyat. Hakikatnya, ada unsur-unsur yang memengaruhi keterlibatan masyarakat, yang membuat masyarakat sadar dan termotivasi untuk terlibat dalam berbagai kegiatan.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting di dalam prosedur perencanaan pembangunan untuk mendorong tanggung jawab masyarakat. Conyers 1994 (dalam Huraerah 2008: 56) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempelajari keadaan masyarakat setempat dan bahwa program pembangunan tidak dapat berhasil tanpanya. Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan hak demokrasi yang melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) merupakan salah satu cara untuk terlibat. Dengan demikian, masyarakat dapat hadir dan memberikan inspirasi serta aspirasi berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi suatu daerah. Dengan demikian, jika masyarakat terlibat aktif dalam pengembangan dan penyusunan inisiatif daerah, mereka akan lebih percaya pada inisiatif tersebut.

Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2019, Kabupaten Pasuruan terdiri dari 365 desa, 24 kelurahan, dan 24 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan setiap tahun melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan sebagai forum untuk menyerap aspirasi dari partisipasi masyarakat. Rapat perencanaan pembangunan tingkat desa pertama kali diselenggarakan, kemudian dilanjutkan dengan rapat perencanaan peningkatan mutu di tingkat kecamatan. Pemerintah dan masyarakat terlibat dalam proses rapat perencanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan rapat perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan pada tahun 2024.

Tabel 1. Partisipasi Masyarakat Musrenbang Kecamatan Di Kabupaten Pasuruan 2024.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Partisipan
1	Tosari	136

No	Nama Kecamatan	Jumlah Partisipan
2	Tutur	132
3	Paserpan	140
4	Puspo	132
5	Purwodadi	130
6	Purwosari	140
7	Wonorejo	133
8	Kejayan	202
9	Lekok	175
10	Lumbang	163
11	Nguling	182
12	Grati	184
13	Gondang Wetan	167
14	Winongan	151
15	Pohjentrek	154
16	Rejoso	140
17	Katon	145
18	Sukorejo	137
19	Rembang	218
20	Beji	163
21	Bangil	155
22	Pandaan	134
23	Gempol	140
24	Prigen	143

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan 2024

Dari tabel di atas terdapat 2 kecamatan yang memiliki perbandingan dalam jumlah partisipasi masyarakatnya. Partisipasi tersebut dilihat dari kehadiran masyarakat dalam Musrebang kecamatan. Menurut pendapat Cohen dan Uphoff 1977 (dalam Fadil 2013:255) Kehadiran sukarela anggota masyarakat pada program yang dirancang untuk masyarakat dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan saat program regional sedang dibentuk merupakan contoh partisipasi masyarakat. Masyarakat juga dapat mengimplementasikan program pembangunan daerah yang sudah disepakati. Menghitung dan mengategorikan keterlibatan komunitas adalah salah satu metode untuk mengukurnya dalam pelaksanaan musrenbang dapat dilihat dari jumlah kehadiran peserta musrenbang yang tertulis dari daftar hadir dan absensi masyarakat, dengan pengumpulan data tersebut dapat dihitung dari jumlah absensi kehadiran paling sedikit dan paling banyak akan menentukan tolak ukur partisipan Uceng et al (2019:3-4).

Penelitian ini ditentukan berdasarkan data di atas dengan membatasi hanya pada 2 kecamatan. Kecamatan tersebut memiliki perbandingan tingkat partisipasi

yang tinggi dan rendah, sehingga dianggap mewakili kondisi atau fenomena pelaksanaan kegiatan Musrenbang secara umum di Kabupaten Passuruan. Berdasarkan data di atas yang bersumber pada Berita Acara pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Rembang merupakan kecamatan dengan tingkat partisipasi masyarakat paling tinggi yaitu 218 partisipan yang terdiri dari 18 peserta undangan perwakilan instansi pemerintahan atau *stakeholder*, 200 perwakilan dari kelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Rembang. Sedangkan di Kecamatan Purwodadi merupakan kecamatan dengan tingkat partisipasi masyarakat paling rendah yaitu 130 partisipan yang terdiri dari 11 peserta undangan perwakilan instansi pemerintah atau *stakeholder*, 119 peserta perwakilan dari kelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Purwodadi.

Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana keterlibatan masyarakat mempengaruhi perencanaan pembangunan mungkin menjadi akar penyebab rendahnya keterlibatan masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat, inisiatif pembangunan pemerintah tidak akan terlaksana secara efektif. Menurut penelitian Wirawan dkk. (2015:301), terdapat keterlibatan masyarakat yang aktif dan meluas dalam Musrebang, dan pemerintah serta masyarakat bekerja sama untuk merencanakan pertumbuhan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dilakukan secara konsensus, menurut Elida (2015:299–300), di mana keputusan tersebut merupakan tugas bersama dalam melaksanakan dan mempertahankan program yang telah disetujui. Sementara itu, penelitian Akbar dkk. (2018:135) menunjukkan bahwa pendidikan, komunikasi, dan kepemimpinan semuanya memiliki dampak pada keterlibatan masyarakat. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat memiliki pengaruh dari internal maupun eksternal. Pengaruh internal dari pendidikan, eksternal dari pemimpin, komunikasi, dan juga peran berbagai pihak.

Salah satu metode pendekatan yang dapat digunakan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah adalah dengan *Human-Centered Design*. Menurut Jhon Wiley (2007:10-11) “manusia memiliki 3 kemampuan yaitu: pertama pandai mengenali sebuah pola dan memetakan pola, kedua mereka dapat mendefinisikan dan dapat mempertimbangkan sesuatu beserta alternatifnya, ketiga manusia pandai membayangkan kemungkinan-kemungkinan, merumuskan ide-ide baru dan membayangkan konsekuensi dari ide-ide tersebut. Ketiga jenis kemampuan inilah yang menjadi salah satu alasan utama manusia disebut sebagai elemen sistem yang kompleks”.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berdasarkan teori *Human-Centered Design* ada 3 penyebabnya yaitu rendahnya inspirasi masyarakat terhadap sebuah permasalahan dan peluang yang ada sehingga masyarakat sulit dalam menentukan aspirasinya, kemudian *ideasi* yang rendah dimana masyarakat disini abai dalam mencari solusi dalam permasalahan yang terjadi dan implementasi yang rendah dikarenakan tidak adanya solusi yang diberikan oleh masyarakat yang terkait.

Masalah yang kemudian ditemukan oleh peneliti dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Pasuruan adalah rendahnya partisipasi masyarakat yang

berkaitan dengan jumlah kehadiran dan aspirasi dari masyarakat. Ketidakhadiran masyarakat tersebut dikarenakan beberapa faktor, masyarakat menyatakan langsung terhadap peneliti. Terkait dengan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan Dengan Pendekatan *Human Cetered Design*.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk melakukan penelitian lapangan, yang merupakan pendekatan penelitian deskriptif tergantung pada sifat topiknya. Penelitian deskriptif melibatkan pengkarakterisasian dan analisis suatu objek berdasarkan data lapangan. Data kualitatif diperoleh dari temuan-temuan fakta dan informasi yang dikumpulkan dari informan melalui wawancara, yang kemudian dijelaskan dalam kata-kata atau frasa yang dikategorikan untuk menarik kesimpulan. Menurut Wiwin (dalam Firman 2018:25) Analisis data dilakukan sebelum kerja lapangan dimulai, selama kerja lapangan, dan setelah kerja lapangan selesai dalam penelitian kualitatif.

Reduksi, penyajian, dan pembuatan kesimpulan merupakan bagian dari analisis data kualitatif. Hal tersebut di atas menekankan bagaimana peneliti menggunakan berbagai sudut pandang dan data langsung dari partisipan penelitian untuk memahami temuan dalam penelitian kualitatif. Interpretasi ini dapat didukung oleh berbagai sumber data, termasuk sejarah, pengalaman individu, catatan wawancara, dan catatan observasi. Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari penelitian kualitatif yang mana Secara spesifik, untuk mengumpulkan bukti-bukti guna memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnyanya tentang fenomena tersebut. Hasilnya, metode *Human Centered Design* akan memberikan gambaran yang jelas tentang pengetahuan tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data statistik daerah Kabupaten Pasuruan 2024. Kabupaten Pasuruan, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah mencapai 1.474,02 km² atau 147.402 hektar, yang setara dengan 3,07% dari total luas Provinsi Jawa Timur. Secara topografi, daerah ini didominasi oleh pegunungan di sebelah barat daya, dengan puncak tertinggi di Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Di bagian tenggara, terdapat dataran tinggi yang diwakili oleh Gunung Bromo, sementara di utara terdapat dataran rendah. Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 112°30' - 113°30' Bujur Timur dan 7°30' - 8°30' Lintang. Secara administratif, kabupaten ini berbatasan dengan beberapa wilayah: di utara berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa, di timur dengan Kabupaten Probolinggo, di selatan dengan Kabupaten Malang, di barat daya dengan Kota Batu, dan di barat dengan Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan, di antaranya Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen,

tangan, makanan olahan, dan konveksi yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor industri dan jasa mendominasi, sektor pertanian tetap memiliki peran penting dalam perekonomian lokal.

Berdasarkan proyeksi penduduk, pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan diperkirakan mencapai 1.634.022 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,44 persen dibandingkan tahun 2022. Berikut ini penulis menyajikan gambar yang menunjukkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2021-2023.



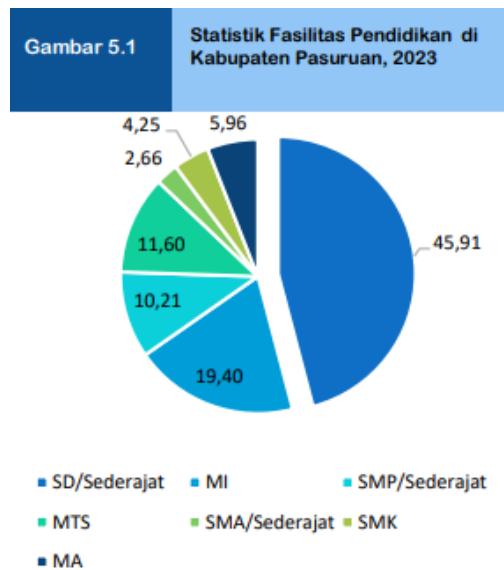
Gambar 1. Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan

Sumber: Data statistik Kabupaten Pasuruan 2024

Rasio jenis kelamin pada tahun 2023 menunjukkan angka 99,54, yang mencerminkan keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Sebaran penduduk tertinggi berada di Kecamatan Gempol dengan 130.810 orang, diikuti oleh Kecamatan Pandaan dengan 112.300 orang. Sebaliknya, Kecamatan Tosari mencatat jumlah penduduk terendah, yaitu 18.550 orang. Dari segi laju pertumbuhan, Kecamatan Rejoso mencatat angka tertinggi pada tahun 2023 dengan 1,14 %, diikuti oleh Kecamatan Beji sebesar 1,11 %, sementara Kecamatan Kraton menunjukkan pertumbuhan yang relatif stagnan. Di sisi lain, Kecamatan Tosari mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,44 %. Perbedaan ini menunjukkan variasi yang signifikan dalam pertumbuhan dan distribusi penduduk di berbagai kecamatan, yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan wilayah di masa depan.

Pendidikan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh, semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini gambar diagram statistik pendidikan di Kabupaten Pasuruan 2023:



Gambar 3. Statistik Pendidikan Kabupaten Pasuruan 2024

Sumber: Data statistik Kabupaten Pasuruan 2024

Di Kabupaten Pasuruan, sekitar 65,31 persen dari total sekolah adalah Sekolah Dasar atau sederajat (SD/MI), diikuti oleh 21,81 persen untuk SMP/MTS, dan sisanya 12,87 persen untuk SMA/MA/SMK. Fasilitas sekolah di antara kecamatan di Kabupaten Pasuruan sangat bervariasi. Berbagai program, seperti wajib belajar 9 tahun, dana BOS (Bantuan Operasional Siswa), beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan beasiswa berprestasi, semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini.

Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan, pendidikan yang berkualitas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan, menjadi sangat relevan. Terdapat faktor-faktor pendukung seperti kesadaran yang meningkat dan akses informasi yang lebih baik, masih ada sejumlah faktor penghambat yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat. Misalnya, kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme Musrenbang yang berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat dan keterbatasan waktu akibat kesibukan sehari-hari contohnya seperti masyarakat lebih memprioritaskan pekerjaannya.

Oleh karena itu, pentingnya peneliti untuk menganalisis kedua faktor tersebut yang menjadi pengaruh tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Pasuruan. dalam Musrenbang dengan harapan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga perencanaan pembangunan yang dilakukan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat dengan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Pasuruan Dengan Pendekatan *Human Cetered Design*.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan didorong oleh tingkat kesadaran yang signifikan di kalangan masyarakat mengenai urgensi keterlibatan mereka. Kesadaran ini termanifestasi dalam bentuk kehadiran sukarela dan keikutsertaan aktif dalam setiap tahapan Musrenbang, mulai dari perumusan ide hingga pengambilan keputusan bersama. Fenomena ini mencerminkan adanya kepedulian intrinsik masyarakat terhadap lingkungan dan masa depan daerah mereka. Masyarakat memahami bahwa pembangunan yang efektif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika aspirasi dan kebutuhan riil dapat terakomodasi. Oleh karena itu, partisipasi bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan sebuah tindakan proaktif yang didasari oleh pemahaman mendalam akan peran krusial mereka sebagai subjek pembangunan.

Dalam konteks *Human-Centered Design*, kesadaran masyarakat ini secara langsung beresonansi dengan tahap Inspirasi. Tahap inspirasi dalam *Human-Centered Design* yang berfokus pada pengumpulan wawasan mendalam dari pengguna dalam hal ini, masyarakat untuk memahami permasalahan dan peluang yang ada. Masyarakat di Kabupaten Pasuruan adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan dan kondisi lingkungan, sehingga memiliki pemahaman yang unik dan otentik mengenai isu-isu yang perlu diatasi. Kehadiran mereka dalam Musrenbang, seperti yang diungkapkan oleh informan, tidak hanya untuk memenuhi undangan, melainkan didorong oleh keinginan kuat untuk menyampaikan usulan yang relevan dengan kondisi riil di desa mereka. Ini adalah bentuk "pengumpulan wawasan" yang paling mendasar, di mana data primer tentang kebutuhan dan masalah diperoleh langsung dari sumbernya.

Lebih lanjut, kemampuan masyarakat dalam mengenali pola permasalahan dan memetakan kebutuhan di lingkungan mereka merupakan manifestasi konkret dari tahap inspirasi *Human-Centered Design*. Mereka tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga sering kali telah memiliki gagasan awal tentang solusi atau perbaikan yang diperlukan. Misalnya, usulan perbaikan infrastruktur jalan atau fasilitas umum muncul dari pengalaman sehari-hari mereka yang merasakan langsung dampak dari kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk menjadi "perancang" awal dalam proses pembangunan, bukan sekadar penerima pasif. Keterlibatan mereka dalam Musrenbang, dengan segala kritik, komentar, dan masukan yang disampaikan, menjadi fondasi data kualitatif yang esensial bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat.

Oleh karena itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam Musrenbang merupakan modal sosial yang sangat berharga, yang secara fundamental mendukung keberhasilan pendekatan *Human-Centered Design*. Dengan adanya kesadaran ini, tahap inspirasi *Human-Centered Design* dapat berjalan secara optimal, karena masyarakat telah siap untuk berbagi wawasan dan pengalaman mereka. Pemerintah, sebagai fasilitator, perlu terus memupuk kesadaran ini melalui

komunikasi yang efektif dan transparan, memastikan bahwa setiap masukan dihargai dan dipertimbangkan. Dengan demikian, Musrenbang tidak hanya menjadi forum formalitas, tetapi sebuah platform kolaboratif yang memberdayakan masyarakat untuk secara aktif membentuk masa depan pembangunan daerah mereka, dimulai dari tahap inspirasi yang kuat dan berbasis pada realitas lokal.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam Musrenbang tidak berhenti pada tahap identifikasi masalah, melainkan berlanjut pada dorongan untuk secara aktif mencari dan mengusulkan solusi. Tingginya antusiasme masyarakat untuk hadir dan menyampaikan aspirasi, sebagaimana terlihat dari data kehadiran dan beragamnya usulan yang diajukan, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya peduli terhadap kondisi lingkungan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam merumuskan gagasan pembangunan. Kesadaran ini mendorong mereka untuk memanfaatkan forum Musrenbang sebagai wadah strategis guna menyalurkan pemikiran konstruktif, yang pada gilirannya menjadi fondasi bagi proses ideasi yang kolaboratif dan inklusif.

Harapan dan keinginan masyarakat adalah pendorong utama partisipasi mereka dalam Musrenbang. Ini bukan sekadar kehadiran fisik, melainkan dorongan dari dalam diri untuk melihat perubahan dan perbaikan di lingkungan mereka. Masyarakat menghadiri kegiatan Musrenbang dengan harapan bahwa suara mereka akan didengar dan usulan mereka akan dipertimbangkan. Mereka percaya bahwa ide-ide mereka bisa membantu membangun daerah menjadi lebih baik. Kepercayaan inilah yang membuat mereka semangat untuk bekerja sama dan mengeluarkan ide-ide baru dalam pertemuan tersebut.

Dalam pendekatan *Human Centered Design*, harapan dan keinginan masyarakat ini sangat mendukung tahap *Ideasi*. Tahap ideasi adalah saat berbagai ide dan solusi kreatif dihasilkan untuk memecahkan masalah yang sudah ditemukan. Pada tahap ini terjadi proses di mana berbagai solusi inovatif dan relevan dihasilkan untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap inspirasi masyarakat yang punya harapan besar secara alami menjadi sumber ide-ide yang banyak dan sesuai dengan kebutuhan. Mereka tidak hanya menunggu pemerintah memberikan solusi, tetapi juga aktif menawarkan ide-ide yang muncul dari pengalaman hidup dan pemahaman mereka tentang kondisi di daerahnya. Contohnya, usulan perbaikan sekolah PAUD/TK yang disampaikan oleh perwakilan PKK atau inisiatif pembangunan fisik yang diutarakan oleh kepala dusun, merupakan contoh nyata dari proses ideasi yang muncul dari kesadaran kolektif. Ide-ide ini, yang sering kali bersifat praktis dan kontekstual, menjadi bahan baku penting dalam merancang program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan.

Masyarakat melihat bahwa usulan mereka ditanggapi dengan baik dan beberapa ide mereka benar-benar terwujud, harapan dan keinginan mereka akan semakin kuat. Pengalaman positif ini membangun kepercayaan mereka terhadap pemerintah daerah dan proses Musrenbang itu sendiri. Ini menciptakan lingkaran yang baik: harapan mendorong partisipasi, partisipasi menghasilkan ide-ide bagus, dan tanggapan positif dari pemerintah semakin memperkuat harapan dan

kepercayaan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa solusi terbaik datang dari pemahaman mendalam dan keterlibatan aktif dari orang-orang yang akan merasakan langsung manfaatnya.

Harapan dan keinginan masyarakat bukan hanya sekadar faktor pendukung, tetapi fondasi penting bagi keberhasilan tahap ideasi dalam *human centered design*. Pemerintah perlu terus menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti usulan masyarakat, meskipun butuh waktu untuk mewujudkannya. Dengan menjaga dan menanggapi harapan ini, Musrenbang bisa menjadi tempat yang dinamis untuk menghasilkan ide-ide. Di sini, gagasan pembangunan tidak hanya datang dari atas, tetapi juga diperkaya oleh sumbangan ide dari masyarakat yang didasari oleh harapan dan pemahaman mendalam tentang daerah mereka.

Kepercayaan masyarakat terhadap respons pemerintah atas aspirasi yang disampaikan. Ketika masyarakat merasa bahwa usulan mereka didengar dan memiliki potensi untuk direalisasikan, motivasi untuk terus berpartisipasi dalam proses *ideasi* akan semakin menguat. Hal ini menciptakan siklus positif di mana harapan dan keinginan masyarakat dapat mendorong partisipasi, partisipasi menghasilkan ide-ide berkualitas, dan respons positif dari pemerintah memperkuat kembali kepercayaan masyarakat.

Proses ini mengubah Musrenbang dari sekadar forum penyampaian keluhan menjadi lokakarya kolaboratif di mana masyarakat menjadi mitra aktif dalam merancang masa depan daerah mereka. Pemerintah perlu terus memfasilitasi dan menghargai setiap ide yang muncul dari masyarakat, menciptakan suasana yang mendukung terciptanya kolaborasi. Musrenbang dapat menjadi laboratorium ide yang dinamis, di mana gagasan-gagasan pembangunan tidak hanya berasal dari perencanaan *top-down*, tetapi juga diperkaya secara signifikan oleh kontribusi *bottom-up* yang didasari oleh kesadaran dan pemahaman mendalam masyarakat terhadap kebutuhan dan potensi daerah mereka.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, meskipun esensial bagi perencanaan pembangunan yang inklusif, sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Salah satu faktor penghambat utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kapasitas individu untuk memahami kompleksitas proses perencanaan, tetapi juga membentuk persepsi mereka terhadap relevansi dan aksesibilitas forum Musrenbang itu sendiri.

Data di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Pasuruan, khususnya di wilayah penelitian, memiliki latar belakang pendidikan hingga tingkat SLTA, bahkan tidak sedikit yang hanya menempuh pendidikan dasar. Keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi ini berdampak pada minimnya literasi perencanaan dan pemahaman terhadap konsep-konsep pembangunan yang lebih abstrak, seperti program non-fisik. Akibatnya, masyarakat cenderung kesulitan mencerna informasi yang disajikan dalam Musrenbang, terutama jika menggunakan bahasa teknis atau prosedur yang rumit.

Rendahnya tingkat pendidikan ini juga memicu perasaan inferioritas atau ketidakpercayaan diri di kalangan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh

beberapa informan, forum Musrenbang sering kali dianggap sebagai "kegiatan untuk orang-orang pintar" atau "hanya untuk orang-orang penting." Persepsi ini menyebabkan mereka enggan untuk aktif berpendapat atau menyampaikan masukan, bahkan ketika mereka memiliki ide atau masalah yang relevan. Mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan didengar atau dipahami, sehingga memilih untuk diam atau hanya hadir sebagai formalitas belaka.

Selain itu, keterbatasan pemahaman akibat pendidikan yang rendah juga memengaruhi preferensi masyarakat terhadap jenis pembangunan. Mereka cenderung lebih tertarik pada pembangunan fisik yang hasilnya dapat langsung terlihat dan dirasakan, seperti perbaikan jalan atau irigasi. Sementara itu, program pembangunan non-fisik, seperti pelatihan keterampilan atau penyuluhan kesehatan, sering kali kurang diminati atau dipahami manfaat jangka panjangnya. Kesenjangan pemahaman ini dapat menyebabkan ketidakselarasan antara usulan masyarakat dan prioritas pembangunan yang lebih luas, memicu kekecewaan ketika usulan mereka tidak terealisasi.

Faktor penghambat kedua yang signifikan adalah kondisi ekonomi dan pekerjaan masyarakat. Bagi sebagian besar warga di Kabupaten Pasuruan, terutama yang berprofesi sebagai buruh pabrik atau petani, waktu adalah komoditas yang sangat berharga dan secara langsung berkaitan dengan pendapatan. Kegiatan Musrenbang yang umumnya diselenggarakan pada pagi hari sering kali berbenturan dengan jam kerja mereka, sehingga memaksa mereka untuk memilih antara berpartisipasi dalam forum pembangunan atau mencari nafkah.

Prioritas terhadap pekerjaan ini menjadi pilihan rasional yang tak terhindarkan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Mereka merasa bahwa meninggalkan pekerjaan, meskipun hanya untuk beberapa jam, akan berdampak langsung pada pendapatan harian mereka dan pada akhirnya memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pernyataan informan yang menyebutkan bahwa "bekerja lebih penting untuk bisa mencukupi kebutuhan" atau "takut dipecat" menggambarkan dilema nyata yang mereka hadapi, di mana kebutuhan ekonomi jangka pendek mendominasi pertimbangan partisipasi sipil.

Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian pendapatan dan kerentanan ekonomi yang dialami oleh banyak keluarga. Bagi mereka, setiap kesempatan untuk mendapatkan penghasilan harus dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, kegiatan yang tidak secara langsung menghasilkan manfaat ekonomi instan, seperti Musrenbang, cenderung dihindari. Meskipun mereka menyadari pentingnya forum tersebut, tekanan ekonomi memaksa mereka untuk mengesampingkan partisipasi demi kelangsungan hidup.

Secara keseluruhan, kombinasi antara rendahnya tingkat pendidikan dan tekanan ekonomi akibat pekerjaan menciptakan lingkaran setan yang menghambat partisipasi masyarakat. Pendidikan yang terbatas membatasi pemahaman dan kepercayaan diri, sementara kebutuhan ekonomi membatasi waktu dan kesempatan untuk terlibat. Untuk meningkatkan partisipasi yang bermakna, intervensi perlu dirancang secara holistik, tidak hanya mengatasi aspek prosedural Musrenbang,

tetapi juga mempertimbangkan akar masalah sosial-ekonomi yang mendasari rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang.

Model Teori *Human Cetered Design* Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Setelah peneliti melakukan analisa terhadap partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Musrenbang, model peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui pendekatan *Human Centered Design* berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, aspirasi, serta konteks sosial-budaya masyarakat sebagai pengguna utama hasil pembangunan. *Human Centered Design* memandang bahwa masyarakat bukan sekadar objek penerima kebijakan, melainkan aktor sentral yang harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses perencanaan. Dalam konteks Musyawarah Perencanaan Pembangunan pendekatan ini dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan partisipasi yang lebih bermakna (*meaningful participation*), bukan hanya secara simbolik atau administratif. *Human Centered Design* mengedepankan proses kolaboratif yang dimulai dengan empati terhadap pengalaman masyarakat, mengidentifikasi hambatan partisipasi, serta merancang solusi yang sesuai dengan realitas lokal. Berikut tahap model peningkatan partisipasi masyarakat menurut Willey 2007 (dalam Annisa 2024:1971) yang sesuai dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan :

Tahapan pertama dalam pendekatan *Human Centered Design* adalah *Empathize* yaitu menggali secara mendalam pengalaman, kebutuhan, serta persepsi masyarakat terhadap Musrenbang. Melalui wawancara, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok terarah, penyelenggara Musrenbang dapat memperoleh pemahaman kontekstual tentang alasan rendahnya partisipasi masyarakat. Misalnya, masyarakat mungkin merasa bahwa bahasa teknis yang digunakan dalam forum terlalu sulit dipahami, waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan rutinitas harian mereka, atau kurangnya rasa memiliki terhadap hasil Musrenbang. Dalam tahap ini, *Human Centered Design* menempatkan perasaan, kebingungan, dan harapan masyarakat sebagai bahan utama dalam merumuskan perbaikan sistem partisipasi.

Tahapan berikutnya, *Define* berfungsi untuk merumuskan permasalahan secara spesifik berdasarkan hasil penggalian empatik. Dalam Musrenbang, hal ini dapat diwujudkan dengan menyusun kerangka masalah partisipasi secara kolaboratif, misalnya dengan menyepakati bahwa partisipasi masyarakat terhambat oleh rendahnya literasi perencanaan, minimnya informasi, atau kurangnya saluran yang inklusif untuk menyampaikan aspirasi. Pada tahap ini, masyarakat diajak bukan hanya untuk mengidentifikasi hambatan, tetapi juga memahami bagaimana hambatan tersebut memengaruhi kualitas pembangunan. Pendekatan ini memberikan ruang reflektif yang memungkinkan masyarakat menyadari peran strategis mereka dalam sistem pembangunan dan mendorong lahirnya motivasi internal untuk berpartisipasi aktif.

Tahap ketiga adalah *Ideate* di mana masyarakat bersama fasilitator dan pemangku kepentingan lainnya secara aktif menghasilkan berbagai ide atau alternatif solusi untuk meningkatkan partisipasi. Misalnya, masyarakat mengusulkan

penggunaan media lokal atau bahasa sederhana dalam sosialisasi Musrenbang, atau merancang jadwal pelaksanaan yang fleksibel agar tidak mengganggu jam kerja. Tahapan ini sangat penting karena membangun rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap solusi yang dihasilkan. Dalam *Human Centered Design*, solusi tidak datang dari atas (*top-down*), tetapi merupakan hasil olah pikir bersama yang mencerminkan kebutuhan nyata warga. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terlibat karena mereka berperan langsung dalam membentuk proses tersebut.

Tahap terakhir adalah *Prototype* dan *Test* yaitu menguji ide-ide yang telah dirancang dalam skala kecil, untuk kemudian disempurnakan sebelum diterapkan secara luas. Dalam konteks Musrenbang, hal ini dapat dilakukan melalui simulasi forum Musrenbang alternatif, misalnya dengan mengadakan forum warga berbasis RT/RW terlebih dahulu, atau mencoba metode pengumpulan aspirasi melalui media visual yang sederhana dan interaktif. Evaluasi dari uji coba ini menjadi dasar penting untuk menyempurnakan pendekatan partisipatif yang lebih adaptif terhadap karakteristik masyarakat. Dengan menerapkan model *Human Cetered Design* secara utuh dan sistematis, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tidak hanya akan meningkat secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan.

KESIMPULAN

Di Kabupaten Pasuruan, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih tergolong minim. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, faktor pendukung partisipasi masyarakat yang terdiri dari dua faktor yaitu masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya untuk berpartisipasi. Pada tahap ini merupakan tahap awal dari Teori *Human Cetered Design* yaitu inspirasi. Harapan dan tujuan masyarakat terhadap kegiatan musrenbang inilah yang menjadi pendorong masyarakat untuk datang dan terlibat dalam menyampaikan aspirasinya melalui usulan-usulan, yang pada gilirannya akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan. Usulan masyarakat disini sama halnya dengan tahap ideasi pada teori *Human Cetered Design*.

Kedua, Sangat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten ini merupakan salah satu dari dua masalah yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di Kecamatan Rembang Dan Kecamatan Purwodadi. Mayoritas pendidikan sampai jenjang SLTA, namun tidak bisa dipungkiri masih ada masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai Sekolah Dasar. Pendidikan masyarakat yang rendah dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya partisipasi masyarakat. Faktor berikutnya adalah ekonomi dan pekerjaan, disini masyarakat banyak mementingkan pekerjaannya ketimbang berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.

Ketiga, model yang dapat digunakan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut pendekatan *Human Cetered Design* ada lima tahap yaitu *Empatize, Define, Ideate, Prototype* dan *Test*. Dimana tahap ini dilakukan dengan harapan partisipasi masyarakat dapat meningkat dan menjadi program yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan . (2024). *Berita Acara Muasrenbang 24 Kecamatan Di Kabupaten Pasuruan*. Kantor Bappelitbangda Raci Pasuruan.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Humaniora.
- Kadji, K. (2016). *Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Penerbit Ilmu Pengetahuan.
- Kecamatan Purwodadi. (2024). *Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024*. Purwodadi: Sekretariat Kecamatan Purwodadi.
- Kecamatan Rembang. (2024). *Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024*. Rembang: Sekretariat Kecamatan Rembang.
- Moleong. (2005). *Teknik Pengumpulan Data*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah*. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 Nomor 17 Tentang Kabupaten Pasuruan*. Jakarta: 10110.
- Subagyo, Joko. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit Ilmu Sosial.
- Sumaryadi, I. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom*. Jakarta: Pustaka.
- Wiley, J., & Sons. (2007). *People And Organization Exploration Of Human Centered Design*. Kanada Amerika Serikat.

Jurnal

- Alfandi, D., Qurniati, R., & Febryano, I. G. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove (Community Participation in Mangrove Management). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(1), 30-41.

- Purnomo, A. (2013). Penerapan Human-Centered Design dalam Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Desa Sugeng, Trawas, Jawa Timur.
- Ubaidillah, I. M., Ramdani, F., & Purnomo, W. (2021). Perancangan Antarmuka Pengguna Website OPTIIK Fotografi Dan Desain FILKOM UB Menggunakan Metode Human Centered Design (HCD), Focus Group Discussion (FGD), Dan Software Usability Scale Questionnaire (SUS). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 5(5), 1914-1920.
- Uceng, A., Ali, A., Mustanir, A., & Nirmawati. (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal MODERAT*, 5(2), 1–17.
- Utomo, B., Helmi, H., Ningrum, M. V. R., & Goma, E. I. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. *Geoedusains: Jurnal Pendidikan Geografi*, 3(2), 59–69.
- Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).

Internet

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. (2024, 28 Februari). *Kabupaten Pasuruan dalam angka 2024* (Nomor katalog: 1102001.3514; Nomor publikasi: 35140.24003). Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan. Diakses dari <https://pasuruankab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/a4b6193a3c412e434f1347b4/kabupaten-pasuruan-dalam-angka-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. (2024, September 26). *Kecamatan Rembang dalam angka 2024*. Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan. Retrieved from <https://pasuruankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/d7a7c88aed6dd4692f4ddae/kecamatan-rembang-dalam-angka-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. (2024, September 26). *Kecamatan Purwodadi dalam angka 2024*. Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan. Retrieved from <https://pasuruankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/f5a9be43fafd775aeda2ddcb/kecamatan-purwodadi-dalam-angka-2024.html>
- Hariyani, S. I. (2017). *Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan*. Bappeda Kabupaten Temanggung. Diakses dari: https://integrasi-opd.temanggungkab.go.id/frontend/d_informasi/203.
- IDEO.org. (2015). *The Field Guide to Human-Centered Design: Design Kit*. Download PDF tersedia gratis melalui situs resmi Design Kit: <https://www.designkit.org/resources/1.html>